

MULTISINTESIS EKSISTENSIAL, TERHADAP TATA KELOLA NEGARA DAN REPOSISI KESEJAHTERAAN PUBLIK

Resmiati¹, Yudhi Hertanto²

Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada¹, Universitas Islam Sultan Agung²

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 8/7/2026; Direvisi: 7/8/2026; Diterbitkan: 25/8/2026

ABSTRAK

Tata kelola negara modern kerap menjadikan digitalisasi dan birokrasi sebagai indikator utama pencapaian kesejahteraan publik. Namun, integrasi teknologi pengawasan dan rasionalitas administratif yang berlebihan berpotensi mengurangi kebebasan, partisipasi, dan martabat warga negara. Artikel ini bertujuan untuk mensintesis pemikiran George Orwell, Franz Kafka, dan Albert Camus dalam mengkaji patologi tata kelola negara kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan sintesis konseptual yang mengintegrasikan perspektif Orwell, Kafka, dan Camus sebagai kerangka analitis untuk mengkritisi tata kelola publik berbasis teknologi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika kritis dan analisis konseptual melalui identifikasi, interpretasi, komparasi, dan sintesis terhadap karya utama ketiga tokoh serta literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan publik tidak cukup diukur melalui efisiensi birokrasi dan teknologi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebebasan, agensi manusia, dan solidaritas sosial. Penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual yang memperlihatkan keterkaitan kritik Orwell terhadap pengawasan, analisis Kafka tentang birokrasi impersonal, dan gagasan Camus mengenai pemberontakan eksistensial sebagai perspektif baru dalam memahami tata kelola publik modern. Temuan ini memperkaya kajian administrasi publik dan filsafat politik dengan menawarkan kerangka evaluasi yang lebih humanis terhadap praktik pemerintahan berbasis teknologi.

Kata Kunci: *Orwellian, Kafkaesque, Absurditas, Pemberontakan Eksistensial, Kesejahteraan Publik.*

ABSTRACT

Modern state governance often equates digitalization and bureaucratic rationalization with the achievement of public welfare. However, the excessive integration of surveillance technologies and administrative rationality may undermine citizens' freedom, participation, and human dignity. This article aims to synthesize the philosophical perspectives of George Orwell, Franz Kafka, and Albert Camus to examine the pathologies of contemporary public governance. The novelty of this study lies in developing a conceptual synthesis that integrates the ideas of Orwell, Kafka, and Camus into a new analytical framework for critically examining technology-driven public governance. This study employs a qualitative method using a critical hermeneutic approach and conceptual analysis through the stages of identifying, interpreting, comparing, and synthesizing the major works of the three thinkers alongside relevant scholarly literature. The findings reveal that public welfare cannot be adequately measured solely by bureaucratic efficiency and technological advancement but must also encompass human freedom, agency, and social solidarity. The study further produces a conceptual synthesis demonstrating that Orwell's critique of surveillance, Kafka's analysis of impersonal bureaucracy, and Camus' notion of existential rebellion collectively provide a new perspective

for understanding the challenges of modern public governance. These findings contribute to the theoretical development of public administration and political philosophy by offering a more human-centered framework for evaluating technology-based governance.

Keywords: *Orwellian, Kafkaesque, Absurdity, Existential Rebellion, Public Welfare.*

PENDAHULUAN

Negara kesejahteraan (*welfare state*) pada era kontemporer tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan melalui kebijakan sosial, tetapi juga sebagai kemampuan negara memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital mendorong berkembangnya digital governance, kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*), analitik data, dan birokrasi berbasis algoritma yang mengubah cara pemerintah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik (Mergel et al., 2021; David, 2024; Alshahrani et al., 2024). Berbagai inovasi tersebut terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan publik, serta kapasitas pengambilan keputusan berbasis data (Anshari et al., 2025; Babšek et al., 2025). Namun, di balik berbagai manfaat tersebut muncul tantangan baru berupa meningkatnya pengawasan digital, konsentrasi kekuasaan pada sistem algoritmik, bias dalam pengambilan keputusan otomatis, serta potensi berkurangnya otonomi dan partisipasi warga negara dalam proses pemerintahan (Wirtz et al., 2022; Valle-Cruz et al., 2023; David, 2024; Alshahrani et al., 2024). Oleh karena itu, kesejahteraan publik pada era digital tidak lagi hanya diukur melalui efisiensi pelayanan, tetapi juga melalui perlindungan hak, kebebasan, martabat manusia, dan akses yang setara terhadap pelayanan publik.

Perubahan paradigma tersebut menjadi fokus utama berbagai penelitian mengenai digital governance, algorithmic governance, artificial intelligence in public administration, dan digital public services. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa implementasi AI dalam administrasi publik memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan etika, transparansi algoritma, tata kelola data, akuntabilitas, perlindungan privasi, serta kepercayaan publik (Criado et al., 2025; Ruvalcaba-Gomez & Garcia-Benitez, 2025; de Fine Licht & Folland, 2025; Donatz-Fest, 2024). Di Indonesia, isu tersebut juga mulai memperoleh perhatian melalui kajian mengenai pelayanan publik digital, reformasi birokrasi berbasis teknologi, kompetensi digital aparatur sipil negara, serta perlindungan hak masyarakat dalam penggunaan AI (Irfan & Anirwan, 2023; Sarjito & Djati, 2025; Djatmiko et al., 2025; Judijanto & Harsya, 2025). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan transformasi digital sebagai persoalan teknis, kelembagaan, atau regulatif sehingga belum banyak mengkaji implikasi filosofis mengenai relasi antara teknologi, kekuasaan, birokrasi, dan kesejahteraan publik. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan konseptual mengenai bagaimana teknologi digital membentuk agensi manusia, relasi kekuasaan, dan makna kesejahteraan dalam administrasi publik kontemporer.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan administrasi publik, filsafat politik, dan etika teknologi untuk memahami transformasi tata kelola digital secara lebih komprehensif. Berbagai penelitian mutakhir menegaskan bahwa keberhasilan implementasi AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga nilai-nilai demokrasi, keadilan, inklusivitas, dan akuntabilitas publik (de Fine Licht & Folland, 2025; Halim et al., 2025; Aprianti & Damayanti, 2025). Dalam konteks tersebut, pemikiran George Orwell mengenai pengawasan, Franz Kafka mengenai birokrasi impersonal, serta Albert Camus mengenai absurditas dan pemberontakan menawarkan perspektif kritis yang relevan untuk menjelaskan

konsekuensi sosial dan politik dari digital governance. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas ketiga pemikir tersebut secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan ketiganya sebagai kerangka konseptual untuk membaca dinamika administrasi publik berbasis teknologi sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih utuh mengenai hubungan antara kekuasaan digital, birokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, Orwell menjelaskan bagaimana pengawasan dan kontrol informasi dapat menjadi instrumen dominasi kekuasaan, Kafka menggambarkan bagaimana birokrasi yang impersonal dapat mengasingkan warga negara dari proses pengambilan keputusan, sedangkan Camus menekankan pentingnya mempertahankan agensi manusia ketika berhadapan dengan sistem yang cenderung mendehumanisasi. Ketiga perspektif tersebut tidak diposisikan sebagai kajian sastra semata, melainkan sebagai instrumen analisis kritis terhadap praktik administrasi publik modern yang semakin dipengaruhi algoritma, AI, dan pengambilan keputusan otomatis. Pendekatan ini menjadi semakin relevan mengingat perkembangan AI dalam sektor publik tidak hanya menghasilkan efisiensi, tetapi juga memperkuat otoritas epistemik algoritma, memengaruhi legitimasi kebijakan, serta membentuk ulang hubungan antara negara dan warga negara (Palese, 2026; Donatz-Fest, 2024; Criado et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjelaskan relevansi pemikiran Orwell, Kafka, dan Camus dalam memahami fenomena digital governance dan kesejahteraan publik secara lebih kritis.

Selain memberikan kritik terhadap praktik administrasi publik berbasis teknologi, penelitian ini juga menempatkan kesejahteraan publik sebagai konsep yang harus dipahami secara humanistik, yakni sebagai kondisi yang memungkinkan warga negara mempertahankan kebebasan, martabat, partisipasi, dan akses yang adil terhadap pelayanan publik. Perspektif tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menekankan pentingnya tata kelola AI yang bertanggung jawab, perlindungan hak digital, inklusi sosial, serta reformasi regulasi untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menghasilkan ketimpangan baru (Djarmiko et al., 2025; Judijanto & Harsya, 2025; Aprianti & Damayanti, 2025; Halim et al., 2025). Dengan demikian, digital governance tidak cukup dievaluasi berdasarkan indikator efisiensi birokrasi semata, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menjaga nilai demokrasi, keadilan sosial, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pemikiran George Orwell, Franz Kafka, dan Albert Camus dalam mengkritisi transformasi tata kelola publik di era digital serta menjelaskan implikasinya terhadap konseptualisasi kesejahteraan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan sintesis konseptual yang mengintegrasikan perspektif filsafat politik, kritik birokrasi, dan etika teknologi sebagai kerangka analisis baru dalam kajian administrasi publik. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada aspek teknis implementasi AI, penelitian ini menawarkan perspektif humanistik untuk menjelaskan hubungan antara algoritma, kekuasaan, birokrasi, dan martabat manusia (Criado et al., 2025; de Fine Licht & Folland, 2025; Palese, 2026). Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pengembangan teori administrasi publik digital sekaligus menjadi dasar konseptual bagi perumusan kebijakan publik yang lebih demokratis, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keseimbangan antara inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan filosofis (*philosophical library research*) yang dipadukan dengan analisis konseptual kritis. Sumber data primer terdiri atas karya George Orwell *Nineteen Eighty-Four*, Franz Kafka *The*

Trial, serta Albert Camus *The Myth of Sisyphus* dan *The Rebel* sebagai teks filosofis yang menjadi objek utama analisis. Keempat karya tersebut dipilih karena merepresentasikan konsep pengawasan, birokrasi, absurditas, pemberontakan, dan martabat manusia yang menjadi landasan konseptual penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah bereputasi, buku akademik, dokumen kebijakan, dan laporan internasional yang diterbitkan pada periode 2021–2026 mengenai *digital governance*, *algorithmic governance*, *surveillance capitalism*, *artificial intelligence* dalam administrasi publik, serta kesejahteraan publik. Literatur dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, kredibilitas sumber, dan kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara transformasi digital, birokrasi, dan kesejahteraan publik.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu identifikasi dan seleksi dokumen, interpretasi isi teks menggunakan teknik *close reading*, kategorisasi tema utama (Orwellian, Kafkaesque, absurditas, dan kesejahteraan publik), komparasi antarteks, serta sintesis konseptual untuk membangun kerangka analisis yang terintegrasi. Hasil interpretasi kemudian dibandingkan dengan temuan penelitian mutakhir dan dokumen kebijakan mengenai tata kelola digital guna menguji konsistensi konsep yang dikembangkan. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi literatur melalui perbandingan berbagai sumber akademik, validasi konseptual dengan teori pendukung, serta *peer debriefing* melalui diskusi akademik terhadap hasil sintesis. Tahapan tersebut menghasilkan kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan pengawasan digital, birokrasi impersonal, dan agensi manusia dalam memahami kesejahteraan publik kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kajian literatur merupakan tahapan penting untuk mengidentifikasi perkembangan konseptual, kecenderungan penelitian, serta kesenjangan ilmiah yang berkaitan dengan transformasi administrasi publik di era digital. Penelusuran berbagai publikasi terkini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai *digital governance*, kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*), dan tata kelola berbasis algoritma berkembang sangat pesat dalam lima tahun terakhir, baik pada konteks global maupun nasional. Literatur tersebut tidak hanya membahas inovasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengangkat isu etika, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan kebijakan publik. Oleh karena itu, pemetaan studi terdahulu diperlukan untuk memperjelas posisi penelitian ini sekaligus menunjukkan ruang kontribusi ilmiah yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian administrasi publik berbasis perspektif filosofis.

Tabel 1. Pemetaan Studi Literatur tentang *Digital Governance*, *Artificial Intelligence*, dan Kesejahteraan Publik dalam Administrasi Publik

No.	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
1	Mergel, Ganapati, & Whitford (2021)	<i>Agile governance</i>	Tata kelola pemerintahan menjadi lebih adaptif dan kolaboratif melalui pendekatan agile.	Menjadi dasar transformasi <i>digital governance</i> .
2	David (2024)	<i>Artificial intelligence</i> dalam administrasi publik	AI meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi menghadirkan tantangan	Mendukung analisis peluang dan risiko AI dalam birokrasi.

No. Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
		etika, transparansi, dan akuntabilitas.	
3 Criado, Sandoval-Almazán, & Gil-Garcia (2025)	AI dan administrasi publik	Menjelaskan tata kelola AI dari perspektif mikro, meso, dan makro.	Memperkuat analisis tata kelola AI secara multidimensi.
4 Ruvalcaba-Gomez & Garcia-Benitez (2025)	Adopsi AI di sektor publik	Menggunakan <i>Multiple Streams Framework</i> untuk menjelaskan faktor adopsi AI.	Mendukung pembahasan implementasi kebijakan AI.
5 Anshari et al. (2025)	AI dan pelayanan publik	AI meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menghadirkan kompleksitas implementasi menuju SDGs.	Menghubungkan AI dengan kesejahteraan publik.
6 Babšek et al. (2025)	Adopsi AI dalam administrasi publik	Menyajikan tren penelitian dan aplikasi AI yang paling berpengaruh.	Memberikan gambaran perkembangan penelitian AI sektor publik.
7 de Fine Licht & Folland (2025)	AI dalam pengambilan keputusan publik	Menawarkan kerangka filosofis untuk menimbang manfaat dan risiko AI.	Memperkuat dimensi etika administrasi publik.
8 Donatz-Fest (2024)	<i>Responsible algorithmization</i>	Menekankan pentingnya organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan algoritma.	Mendukung konsep birokrasi algoritmik yang akuntabel.
9 Irfan & Anirwan (2023)	Pelayanan publik digital	Transformasi digital meningkatkan efektivitas pelayanan publik.	Memberikan konteks implementasi di Indonesia.
10 Djatmiko, Sinaga, & Pawirosumarto (2025)	Transformasi digital dan inklusi sosial	<i>E-government</i> meningkatkan akses layanan kelompok marginal.	Mendukung dimensi kesejahteraan dan inklusi sosial.
11 Sarjito & Djati (2025)	Kompetensi digital ASN	Kompetensi digital ASN menjadi faktor penting reformasi birokrasi digital.	Mendukung aspek kapasitas birokrasi.
12 Judijanto & Harsya (2025)	Etika dan hukum AI	Perlindungan privasi menjadi isu utama dalam penggunaan AI.	Mendukung pembahasan hak digital warga negara.
13 Halim et al. (2025)	Etika pelayanan publik	Menekankan nilai kemanusiaan dalam <i>digital governance</i> .	Memperkuat perspektif humanistik.
14 Aprianti & Damayanti (2025)	Regulasi AI dan HAM	Regulasi AI harus menjamin perlindungan HAM.	Mendukung dimensi hukum administrasi digital.
15 Palese (2026)	Kekuasaan algoritmik	AI membentuk otoritas pengetahuan dan memengaruhi demokrasi.	Relevan dengan perspektif Orwell mengenai kekuasaan digital.

No. Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
16 Alshahrani et al. (2024)	AI dan pengambilan keputusan pemerintah	Mengidentifikasi peluang, tantangan, dan agenda riset AI pemerintah.	Mendukung evaluasi kebijakan berbasis AI.
17 Panda et al. (2025)	AI di sektor publik	AI mentransformasi pelayanan dan tata kelola sektor publik.	Mendukung pembahasan transformasi birokrasi digital.
18 Gunasekara et al. (2025)	<i>Responsible AI</i>	Menyusun prinsip-prinsip AI yang etis dan bertanggung jawab.	Memperkuat kerangka etika AI.
19 Nugroho, Hanim, & Delgado (2026)	<i>AI governance</i> global	Mengembangkan kerangka tata kelola AI lintas negara.	Mendukung tata kelola AI dalam administrasi publik.
20 de Fine Licht (2025)	Keadilan prosedural AI	Mengembangkan kerangka penyelesaian konflik nilai dalam tata kelola AI.	Mendukung analisis transparansi dan akuntabilitas.
21 Gritsenko & Wood (2022)	<i>Algorithmic governance</i>	Menjelaskan model tata kelola berbasis algoritma.	Menjadi landasan konsep birokrasi algoritmik.
22 Nambiar & Mundra (2022)	<i>Data warehouse</i> dan <i>data lake</i>	Infrastruktur data menjadi fondasi transformasi digital.	Mendukung pembahasan integrasi data pemerintahan.
23 Shin (2026)	AI dan epistemologi	AI mengubah otoritas, verifikasi, dan konstruksi kebenaran.	Relevan dengan legitimasi kebijakan publik digital.
24 Sigurjonsson et al. (2024)	Keberlanjutan transformasi digital	Menekankan pentingnya keberlanjutan layanan digital pemerintah.	Mendukung evaluasi transformasi digital jangka panjang.
25 Pratiwi et al. (2025)	Digitalisasi administrasi	Digitalisasi meningkatkan mutu pelayanan birokrasi.	Mendukung pembahasan reformasi administrasi publik.
26 Nggilu & Mokodongan (2026)	SDM publik berbasis kompetensi digital	Kompetensi digital dan etika menjadi fondasi birokrasi modern.	Mendukung dimensi kapasitas kelembagaan.
27 Nada et al. (2024)	AI sebagai subjek hukum	Mengkaji urgensi regulasi AI di Indonesia.	Mendukung aspek hukum administrasi digital.
28 Tanjung (2026)	HAM di era AI	Rekonstruksi kebijakan hukum berbasis prinsip kemanusiaan.	Memperkuat perspektif Camus tentang martabat manusia.
29 Susilawati, Yanti, & Erni (2023)	Transformasi digital pemerintah	Mengidentifikasi manfaat dan hambatan implementasi <i>e-government</i> .	Memberikan konteks empiris Indonesia.
30 Vatamanu & Tofan (2025)	AI dalam administrasi publik	Menjelaskan tantangan dan kerentanan implementasi AI.	Mendukung analisis risiko birokrasi digital.

No.	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
31	Branchini & Vallina Acha (2025)	AI untuk evaluasi kebijakan publik	AI berpotensi meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan.	Mendukung efektivitas pengambilan keputusan publik.
32	Wirtz et al. (2022)	AI dalam administrasi publik	Menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola AI.	Landasan konseptual birokrasi digital.
33	Valle-Cruz et al. (2023)	<i>Algorithmic governance</i>	Algoritma meningkatkan efisiensi tetapi memerlukan pengawasan.	Mendukung perspektif Kafka tentang birokrasi impersonal.
34	OECD (2023)	<i>Human-centered governance</i>	Tata kelola digital harus berorientasi pada manusia dan kepercayaan publik.	Mendukung perspektif Camus mengenai agensi warga negara.
35	United Nations (2024)	Tata kelola digital global	Menekankan transformasi digital yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.	Mendukung konsep kesejahteraan publik dan demokrasi digital.

Berdasarkan pemetaan studi literatur pada Tabel 1, dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu secara umum berfokus pada aspek implementasi teknologi, efektivitas pelayanan publik, tata kelola data, regulasi kecerdasan artifisial, serta penguatan etika dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih menempatkan transformasi digital sebagai persoalan teknis, kelembagaan, atau regulatif sehingga pembahasan mengenai dimensi filosofis, eksistensial, dan kemanusiaan belum memperoleh perhatian yang memadai. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kritik George Orwell mengenai pengawasan digital, perspektif Franz Kafka tentang birokrasi impersonal, dan pemikiran Albert Camus mengenai agensi manusia sebagai satu kerangka analisis yang utuh dalam menjelaskan relasi antara teknologi, kekuasaan, dan kesejahteraan publik. Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan sintesis konseptual yang menghubungkan ketiga perspektif filosofis tersebut dengan teori *digital governance*, *algorithmic governance*, dan tata kelola kecerdasan artifisial sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi baru bagi pengembangan administrasi publik yang lebih humanistik, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Sintesis hasil analisis filosofis disusun untuk mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kerangka konseptual yang mampu menjelaskan dinamika tata kelola publik pada era transformasi digital secara lebih komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya menelaah aspek teknis penerapan teknologi dalam administrasi publik, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi kekuasaan, birokrasi, dan kemanusiaan sebagai satu kesatuan analitis. Melalui integrasi pemikiran George Orwell, Franz Kafka, dan Albert Camus, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa transformasi digital membawa konsekuensi yang melampaui persoalan efisiensi birokrasi, yaitu menyangkut relasi antara negara, teknologi, dan warga negara. Oleh karena itu, penyajian sintesis konseptual menjadi penting untuk memperlihatkan bagaimana ketiga perspektif filosofis tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan tantangan sekaligus arah pengembangan tata kelola publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. Sintesis Hasil Analisis Filosofis terhadap Transformasi Tata Kelola Digital

Dimensi Analisis	Perspektif Orwell	Perspektif Kafka	Perspektif Camus	Implikasi terhadap Kesejahteraan Publik
Bentuk kekuasaan	Pengawasan digital (<i>state surveillance</i>), kontrol informasi	Birokrasi algoritmik (<i>algorithmic governance</i>)	Perlawanan terhadap sistem yang mendehumanisasi	Kesejahteraan harus menjamin kebebasan sekaligus perlindungan hak warga
Posisi warga negara	Objek pengawasan	Objek prosedur birokrasi	Subjek yang memiliki agensi	Partisipasi warga menjadi indikator kesejahteraan
Peran teknologi	Memperluas kontrol negara	Mengotomatisasi pengambilan keputusan	Menjadi sarana yang harus tetap berpusat pada manusia	Teknologi harus mendukung nilai kemanusiaan
Risiko utama	Hilangnya privasi, kebebasan berekspresi, manipulasi informasi	Bias algoritma, hilangnya diskresi, alienasi administratif	Melemahnya martabat manusia apabila agensi diabaikan	Diperlukan tata kelola digital yang transparan, adil, dan akuntabel
Solusi konseptual	Transparansi dan pembatasan pengawasan	<i>Human oversight</i> , audit algoritma, ruang diskresi	<i>Human-centered governance</i> , solidaritas sosial, perlindungan hak digital	Kesejahteraan publik diukur dari efisiensi sekaligus perlindungan martabat manusia

Berdasarkan sintesis yang disajikan pada Tabel 2, dapat dipahami bahwa transformasi tata kelola digital memerlukan keseimbangan antara pemanfaatan inovasi teknologi dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Integrasi ketiga perspektif filosofis menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi publik tidak cukup dinilai dari peningkatan efektivitas pelayanan atau percepatan proses birokrasi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kebebasan, keadilan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Sintesis tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan pengawasan digital, birokrasi algoritmik, dan melemahnya agensi warga negara merupakan isu yang saling berkaitan sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang bersifat multidimensional. Dengan demikian, model konseptual yang dihasilkan menjadi landasan teoritis untuk mengembangkan *digital governance* yang tidak hanya inovatif dan efisien, tetapi juga transparan, demokratis, inklusif, serta berpusat pada manusia sebagai tujuan utama penyelenggaraan kesejahteraan publik.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik menghasilkan hubungan yang kompleks antara peningkatan efisiensi pelayanan dan perlindungan hak-hak warga negara. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian mutakhir yang menjelaskan bahwa *digital governance* didukung oleh integrasi data, pemanfaatan *data warehouse* dan *data lake*, otomatisasi proses administrasi, serta penerapan kecerdasan artifisial yang mampu meningkatkan kualitas layanan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat efektivitas birokrasi (Mergel et al., 2021; Nambiar & Mundra, 2022; Panda et al., 2025; Babšek et al., 2025; Branchini & Vallina Acha, 2025). Meskipun demikian, berbagai

penelitian juga menunjukkan bahwa adopsi *AI* dalam sektor publik memunculkan tantangan berupa bias algoritma, rendahnya transparansi sistem, kerentanan keamanan data, serta meningkatnya risiko pengawasan digital yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Wirtz et al., 2022; David, 2024; Vatamanu & Tofan, 2025; de Fine Licht, 2025). Oleh karena itu, efektivitas tata kelola digital tidak cukup diukur berdasarkan efisiensi administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan prosedural, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak-hak warga negara sebagaimana ditekankan dalam berbagai kerangka *responsible artificial intelligence* (Gunasekara et al., 2025; de Fine Licht, 2025).

Perspektif George Orwell memberikan kerangka interpretatif untuk memahami bagaimana teknologi digital memperluas kapasitas negara dalam melakukan pengawasan melalui pemanfaatan data dan algoritma. Perkembangan *data-driven governance* menunjukkan bahwa data digital kini menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik, evaluasi pelayanan, serta prediksi perilaku masyarakat melalui sistem analitik berbasis *AI* (Kitchin, 2021; Panda et al., 2025). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi *smart city*, identitas digital, dan sistem pelayanan berbasis data memberikan manfaat nyata bagi efektivitas administrasi publik, namun keberlanjutan transformasi tersebut sangat bergantung pada tata kelola digital yang transparan, perlindungan hak digital, serta mekanisme pengawasan demokratis agar tidak menghasilkan konsentrasi kekuasaan berbasis informasi (Sigurjonsson et al., 2024; Nugroho et al., 2026; Tanjung, 2026). Selain itu, perkembangan *AI* juga mulai memengaruhi konstruksi otoritas pengetahuan dan legitimasi kebijakan publik sehingga risiko manipulasi informasi dan dominasi algoritmik menjadi isu penting dalam demokrasi digital (Shin, 2026). Dengan demikian, perspektif Orwell dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai kritik terhadap pengawasan negara, tetapi juga sebagai instrumen konseptual untuk mengevaluasi implikasi etis dan politik dari tata kelola digital kontemporer.

Temuan mengenai birokrasi algoritmik juga menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan penelitian mengenai *algorithmic governance*, *artificial intelligence in public administration*, dan *responsible AI*. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa algoritma mampu meningkatkan konsistensi, kecepatan, dan objektivitas pelayanan publik, tetapi efektivitas tersebut hanya dapat dicapai apabila didukung oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan prosedural, serta mekanisme koreksi terhadap potensi bias sistem (Gritsenko & Wood, 2022; Valle-Cruz et al., 2023; Donatz-Fest, 2024; de Fine Licht, 2025; Gunasekara et al., 2025). Dalam konteks tersebut, perspektif Kafka membantu menjelaskan bahwa birokrasi digital berpotensi menjadi semakin impersonal apabila pengambilan keputusan sepenuhnya bergantung pada prosedur otomatis tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Fenomena tersebut juga diperkuat oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa integrasi *AI* dalam administrasi publik memerlukan keseimbangan antara otomatisasi birokrasi, diskresi administratif, dan pertimbangan etis agar pelayanan publik tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat (Criado et al., 2025; Vatamanu & Tofan, 2025; Panda et al., 2025). Dengan demikian, sintesis penelitian ini melengkapi kajian administrasi publik melalui integrasi dimensi administratif, filosofis, dan eksistensial yang selama ini lebih sering dibahas secara terpisah.

Berbeda dengan dua perspektif sebelumnya yang berfokus pada mekanisme kekuasaan dan birokrasi, pemikiran Albert Camus memberikan dimensi normatif mengenai pentingnya agensi manusia dalam tata kelola publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan publik tidak hanya berkaitan dengan tersedianya layanan yang efisien, tetapi juga dengan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi, memperoleh perlakuan yang adil, dan

mempertahankan martabatnya dalam proses administrasi. Temuan ini konsisten dengan perkembangan pendekatan *human-centered governance* dan *responsible AI* yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, transparansi, serta perlindungan hak digital sebagai fondasi utama transformasi birokrasi modern (OECD, 2023; United Nations, 2024; Gunasekara et al., 2025; Nggilu & Mokodongan, 2026). Dalam konteks Indonesia, penguatan kompetensi digital aparatur, etika pelayanan publik, serta pengaturan hukum *AI* menjadi prasyarat penting agar transformasi digital tidak mengabaikan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Susilawati et al., 2023; Nada et al., 2024; Tanjung, 2026). Oleh karena itu, konsep pemberontakan eksistensial Camus dalam penelitian ini diinterpretasikan sebagai penguatan agensi warga negara melalui transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia, bukan sebagai bentuk resistensi politik revolusioner.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan model sintesis konseptual yang menghubungkan tiga dimensi utama, yaitu pengawasan digital (Orwell), birokrasi algoritmik (Kafka), dan agensi manusia (Camus), dalam menjelaskan kesejahteraan publik di era transformasi digital. Model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *digital governance* bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan tata kelola data, transparansi algoritma, keadilan prosedural, serta perlindungan hak-hak digital masyarakat (de Fine Licht, 2025; Nugroho et al., 2026; Branchini & Vallina Acha, 2025). Kerangka ini juga memperlihatkan bahwa evaluasi kebijakan publik berbasis *AI* tidak cukup berorientasi pada kinerja birokrasi, tetapi harus memasukkan dimensi legitimasi, kepercayaan publik, keberlanjutan transformasi digital, dan perlindungan nilai-nilai demokrasi (Sigurjonsson et al., 2024; Panda et al., 2025; Gunasekara et al., 2025). Dengan demikian, temuan penelitian menawarkan kerangka analisis integratif yang mempertemukan perspektif filsafat politik, administrasi publik, dan tata kelola *AI* dalam satu model konseptual yang relatif belum banyak dikembangkan dalam penelitian sebelumnya.

Secara teoretis, sintesis konseptual yang dihasilkan memperkaya kajian administrasi publik dengan menghubungkan teori *digital governance*, *algorithmic governance*, filsafat politik, etika administrasi, serta *AI governance* dalam satu kerangka analisis. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya melalui efisiensi, efektivitas, atau inovasi teknologi, tetapi juga melalui indikator kebebasan sipil, akuntabilitas algoritmik, perlindungan hak digital, keadilan prosedural, dan penghormatan terhadap martabat manusia (de Fine Licht, 2025; Gunasekara et al., 2025; Nugroho et al., 2026; Shin, 2026). Kontribusi konseptual tersebut memperluas diskursus mengenai hubungan antara teknologi, birokrasi, dan kesejahteraan publik dengan mengintegrasikan perspektif Orwell, Kafka, dan Camus ke dalam kerangka evaluasi tata kelola digital yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keberlanjutan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar teoritis bagi pengembangan penelitian lanjutan mengenai administrasi publik digital sekaligus menjadi rujukan konseptual dalam perumusan kebijakan *AI* yang bertanggung jawab, inklusif, dan berpusat pada manusia.

KESIMPULAN

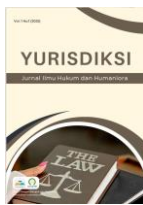
Berdasarkan hasil sintesis konseptual terhadap pemikiran George Orwell, Franz Kafka, dan Albert Camus, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola publik berbasis teknologi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan efisiensi administrasi, tetapi juga memengaruhi hubungan antara pengawasan digital, birokrasi algoritmik, dan agensi warga negara. Temuan penelitian menegaskan bahwa kesejahteraan publik perlu dipahami secara multidimensional dengan mempertimbangkan kebebasan, transparansi, akuntabilitas, dan

martabat manusia, selain indikator administratif dan ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada dihasilkannya model sintesis konseptual Orwell–Kafka–Camus yang mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut sebagai kerangka analisis baru dalam kajian administrasi publik dan tata kelola digital. Model tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi keberhasilan digital governance memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan hak warga negara, dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara teoretis, sintesis konseptual yang dihasilkan memperluas kajian administrasi publik, filsafat politik, dan digital governance dengan menghadirkan perspektif integratif yang menghubungkan dimensi teknologi, birokrasi, dan agensi manusia dalam memahami kesejahteraan publik kontemporer. Temuan ini juga memberikan implikasi praktis bahwa pengembangan kebijakan digital perlu memperkuat transparansi algoritma, akuntabilitas pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, model konseptual yang dihasilkan dapat diuji melalui penelitian empiris pada implementasi digital governance, studi komparatif lintas negara, maupun evaluasi kebijakan publik berbasis kecerdasan artifisial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan refleksi filosofis, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual yang dapat digunakan sebagai landasan bagi pengembangan teori maupun penelitian lanjutan mengenai tata kelola publik di era digital.

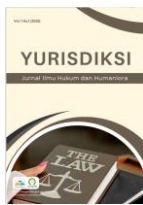
DAFTAR PUSTAKA

- Alshahrani, A., Griva, A., Dennehy, D., & Mäntymäki, M. (2024). Artificial intelligence and decision-making in government functions: opportunities, challenges and future research. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(4), 678-698. <https://doi.org/10.1108/TG-06-2024-0131>
- Anshari, M., Hamdan, M., Ahmad, N., & Ali, E. (2025). Public service delivery, artificial intelligence and the sustainable development goals: trends, evidence and complexities. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 16(1), 163-181. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2023-0123>
- Aprianti, N., & Damayanti, G. A. R. (2025). Negara Hukum di Era Algoritma: Algoritma Reformulasi Regulasi Artificial Intelligence untuk Menjamin Perlindungan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 8(2), 98-109. <https://doi.org/10.53977/wk.v8i2.3312>
- Babšek, M., Ravšelj, D., Umek, L., & Aristovnik, A. (2025). Artificial intelligence adoption in public administration: An overview of top-cited articles and practical applications. *AI*, 6(3), 44. <https://doi.org/10.3390/ai6030044>
- Branchini, B., & Vallina Acha, B. (2025). Use and application of artificial intelligence in public policy evaluation. A scoping review. <https://riunet.upv.es/handle/10251/230119>
- Criado, J. I., Sandoval-Almazán, R., & Gil-Garcia, J. R. (2025). Artificial intelligence and public administration: Understanding actors, governance, and policy from micro, meso, and macro perspectives. *Public Policy and Administration*, 40(2), 173-184. <https://doi.org/10.1177/09520767241272921>
- David, G. (2024). Artificial intelligence: Opportunities and challenges for public administration. *Canadian Public Administration*, 67(3), 388-406. <https://doi.org/10.1111/capa.12580>
- de Fine Licht, K. (2025). Resolving value conflicts in public AI governance: A procedural justice framework. *Government Information Quarterly*, 42(2), 102033. [10.1016/j.giq.2025.102033](https://doi.org/10.1016/j.giq.2025.102033)



- de Fine Licht, K., & Folland, A. (2025). AI in Public Decision-Making: A Philosophical and Practical Framework for Assessing and Weighing Harm and Benefit. *Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/padm.70029>
- Djatkiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital transformation and social inclusion in public services: A qualitative analysis of e-government adoption for marginalized communities in sustainable governance. *Sustainability*, 17(7), 2908. <https://doi.org/10.3390/su17072908>
- Donatz-Fest, I. C. (2024). Organizing for Responsible Algorithmization. *Information Polity*, 15701255261456427. <https://doi.org/10.1177/15701255261456427>
- Gritsenko, D., & Wood, M. (2022). Algorithmic governance: A modes of governance approach. *Regulation & Governance*, 16(1), 45-62. <https://doi.org/10.1111/rego.12367>
- Gunasekara, L., El-Haber, N., Nagpal, S., Moraliyage, H., Issadeen, Z., Manic, M., & De Silva, D. (2025). A systematic review of responsible artificial intelligence principles and practice. *Applied System Innovation*, 8(4), 97. <https://doi.org/10.3390/asi8040097>
- Halim, D., Herman, H., Susilawati, A. C., El Adawiyah, P. R., Has, N. I., & Zumarina, Z. (2025). Etika Pelayanan Publik di era Digital Governance: Kajian Filsafat Administrasi Publik. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 11(2), 41-65. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v11i2.8985>
- Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan publik era digital: Studi literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23-31. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477>
- Judijanto, L., & Harsya, R. M. K. (2025). Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(03), 141-149. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.543>
- Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. B. (2021). Agile: A new way of governing. *Public administration review*, 81(1), 161-165. <https://doi.org/10.1111/puar.13202>
- Nada, F., Abqori, F. F., RH, D. R. N. F., Rahadiyan, I., & Riswandi, B. A. (2024, July). Gagasan pengaturan artificial intelligence sebagai subjek hukum di Indonesia. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 149-157). <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/35472>
- Nambiar, A., & Mundra, D. (2022). An overview of data warehouse and data lake in modern enterprise data management. *Big data and cognitive computing*, 6(4), 132. <https://doi.org/10.3390/bdcc6040132>
- Nggilu, R., & Mokodongan, R. (2026). Model Manajemen SDM Publik Berbasis Kompetensi Digital dan Etika Pelayanan Publik (Studi Konseptual pada Dinas Kepegawaian Kota Gorontalo). *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 14(1), 111-127. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v14i1.19144>
- Nugroho, M. F. A., Hanim, S. N., & Delgado, L. A. (2026). Beyond Regulatory Fragmentation: Developing a Global Administrative AI Governance Framework for Cross-Border Artificial Intelligence Systems. *Justicia Insight*, 2(2), 62-72. <https://doi.org/10.70716/justin.v2i2.383>
- Palese, R. (2026). Artificial truth: Algorithmic power, epistemic authority, and the crisis of democratic knowledge. *Societies*, 16(3), 102. <https://doi.org/10.3390/soc16030102>
- Panda, M., Hossain, M. M., Puri, R., & Ahmad, A. (2025). Artificial intelligence in action: shaping the future of public sector. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 27(6), 668-686. <https://doi.org/10.1108/DPRG-10-2024-0272>





- Pratiwi, S. F., Zalukhu, L. A., Tesa, A. R., & Saputra, B. (2025). Implementasi digital pada tata kelola administrasi: upaya meningkatkan mutu pelayanan di era birokrasi modern. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15521459>
- Ruvalcaba-Gomez, E. A., & Garcia-Benitez, V. H. (2025). The Multiple Streams Framework: A Lens for Understanding Artificial Intelligence Adoption in the Public Sector. *Policy & Internet*, 17(4), e70021. <https://doi.org/10.1002/poi3.70021>
- Sarjito, A., & Djati, S. P. (2025). Implikasi kompetensi digital aparatur sipil negara milenial terhadap reformasi birokrasi digital di era transformasi pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 87-109. <https://doi.org/10.52316/jap.v21i1.610>
- Shin, D. (2026). Automating epistemology: How AI reconfigures truth, authority, and verification. *Ai & Society*, 41(2), 1553-1559. <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02560-y>
- Sigurjonsson, T. O., Jónsson, E., & Gudmundsdottir, S. (2024). Sustainability of digital initiatives in public services in digital transformation of local government: Insights and implications. *Sustainability*, 16(24), 10827. <https://doi.org/10.3390/su162410827>
- Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni, E. (2023). Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya). *Journal Social Society*, 3(2), 80-94. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.338>
- Tanjung, M. A. (2026). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Era Artificial Intelligence: Rekonstruksi Kebijakan Hukum Indonesia Berbasis Prinsip Kemanusiaan. *Journal of Law and Humanity Studies*, 3(1), 38-42. <https://doi.org/10.59613/khbvvpk68>
- Vatamanu, A. F., & Tofan, M. (2025). Integrating artificial intelligence into public administration: Challenges and vulnerabilities. *Administrative Sciences*, 15(4), 149. <https://doi.org/10.3390/admsci15040149>

